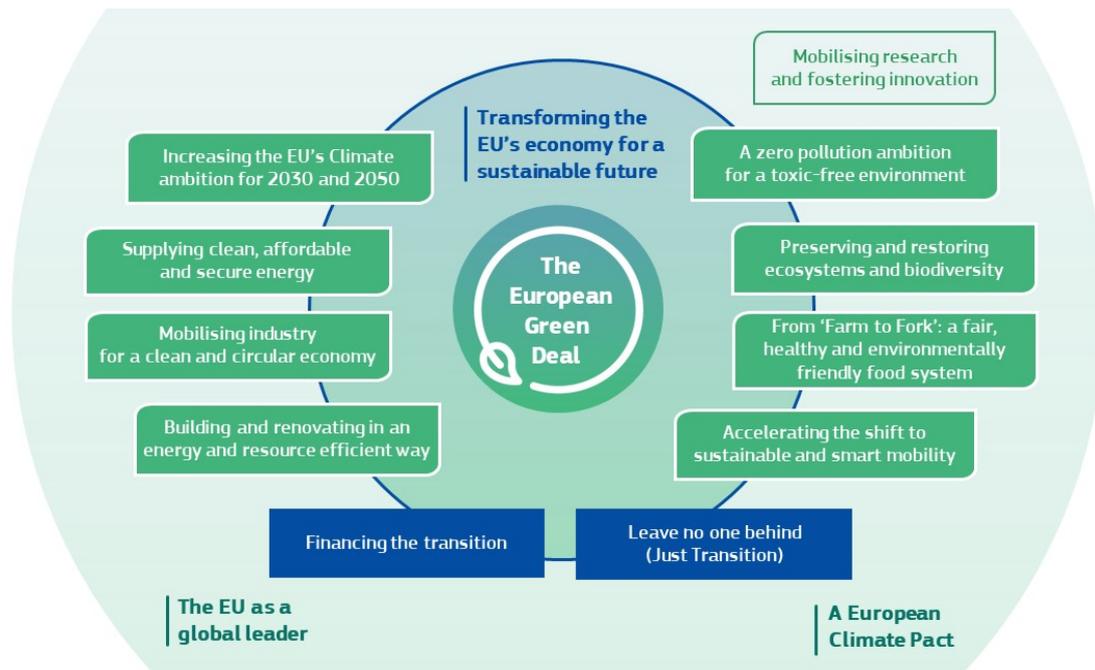


Implementasi Kesepakatan Hijau Eropa (*European Green Deal/EGD*) Serta Dampaknya Terhadap Transisi Energi dan Sektor Terkait Lainnya



The European Green Deal (EGD). Sumber: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640>

Executive Summary

Implementasi Kesepakatan Hijau Eropa atau *European Green Deal* (EGD) dapat memberikan dampak dan peluang bagi Indonesia. Implementasi EGD tidak hanya memberikan tantangan besar bagi sektor kelapa sawit dan batu bara, tetapi juga membuka peluang investasi dalam energi terbarukan dan teknologi hijau. Negosiasi I-EU CEPA penting untuk memperkuat hubungan perdagangan dengan Uni Eropa, meskipun ada hambatan dalam standar keberlanjutan dan perdagangan teknis. Dengan dukungan internasional, Indonesia dapat memanfaatkan EGD untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Komitmen terhadap Kesepakatan Paris, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan target *Net Zero Emissions* (NZE) pada 2060 menunjukkan ambisi transisi energi Indonesia.

Inisiatif seperti moratorium perkebunan kelapa sawit, pencegahan kebakaran hutan, dan pengembangan kawasan industri hijau perlu dikomunikasikan dengan baik. Penguatan sertifikasi ISPO dan program peremajaan kebun kelapa sawit, serta pendanaan hijau dan inisiatif pengurangan sampah plastik, juga penting dalam memastikan keberlanjutan.

Latar Belakang

Kesepakatan Hijau Eropa (*European Green Deal/EGD*) diperkenalkan pada Desember 2019 oleh Komisi Eropa, yang bertujuan untuk membuat Eropa netral iklim pada tahun 2050 melalui serangkaian langkah yang mencakup dekarbonisasi, transisi energi bersih, dan pertumbuhan berkelanjutan. Sejak diperkenalkan, terdapat

beberapa kemajuan positif untuk Uni Eropa, diantaranya adalah:

- Telah disahkan beberapa regulasi penting yang bertujuan mendukung tujuan netralitas iklim, seperti UU Iklim EU, paket Fit for 55, dan Strategi Adaptasi Iklim 2021. Kerangka kerja ini sangat penting untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), yang telah berkurang sebesar 32,5% dari level tahun 1990 hingga 2022 (Institute for European Environmental Policy, 2024).
- Terdapat beberapa perkembangan positif di sektor ekonomi hijau, dengan peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja di bidang energi terbarukan dan praktik berkelanjutan (European Union, 2024).
- EU dipandang telah membuat kemajuan dalam melindungi keanekaragaman hayati, dengan perluasan area yang dilindungi (Institute for European Environmental Policy, 2024).

Dampak EGD Terhadap Transisi Energi dan Sektor Terkait Indonesia

Dampak positif dari implementasi EGD terhadap transisi energi di Indonesia dapat dianalisis dari beberapa perspektif diantaranya:

- **Potensi Kemitraan Ekonomi dan Investasi.** EGD mendorong perusahaan dan pemerintah Eropa untuk berinvestasi dalam proyek Energi Terbarukan secara global, termasuk Indonesia yang dapat diperkenalkan teknologi hijau canggih dari Eropa yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek Energi Terbarukan. Selain itu, pendanaan dari Eropa dapat menyediakan modal yang diperlukan untuk proyek Energi Terbarukan berskala besar yang mungkin sulit didanai Indonesia sendiri.
- **Memperbaiki Hubungan Perdagangan.** EGD dapat meningkatkan permintaan untuk barang yang diproduksi secara berkelanjutan. Ekspor Indonesia yang memenuhi standar keberlanjutan Eropa, seperti minyak sawit berkelanjutan dan mineral hijau untuk baterai,

dapat menemukan pasar yang menguntungkan di Eropa.

- **Mendorong Perubahan Kebijakan dan Regulasi.** Untuk mempertahankan akses ke pasar Eropa, industri Indonesia mungkin perlu mematuhi peraturan lingkungan yang lebih ketat, sehingga mempercepat reformasi kebijakan domestik menuju keberlanjutan. EGD juga dapat menginspirasi Indonesia untuk mengadopsi target iklim yang lebih ambisius dan mengembangkan peta jalan yang rinci untuk menarik kemitraan dan investasi dari Eropa. Selain itu, penekanan EGD pada mekanisme harga karbon dapat mendorong Indonesia untuk mempertimbangkan penerapan atau penguatan inisiatif harga karbonnya sendiri.
- **Mendorong Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan.** Kolaborasi yang meningkat dapat menghasilkan lebih banyak usaha bersama dalam Energi Terbarukan, membantu Indonesia mencapai target energi terbarukan. Keahlian Eropa dalam jaringan pintar dan solusi penyimpanan energi dapat membantu Indonesia mengintegrasikan bagian yang lebih besar dari energi terbarukan ke dalam jaringan nasionalnya.
- **Dampak Positif Pada Pengelolaan Lingkungan dan Sosial.** Standar perlindungan lingkungan Eropa dapat mendorong praktik lingkungan yang lebih baik di industri Indonesia, mengurangi polusi dan menjaga keanekaragaman hayati. Fokus EGD pada transisi yang adil dapat mendorong kebijakan di Indonesia yang memastikan perlakuan adil bagi pekerja yang terkena dampak transisi energi, seperti program pelatihan ulang bagi pekerja yang beralih dari sektor batu bara ke sektor Energi Terbarukan.

Dampak Negatif Pelaksanaan EGD Terhadap Indonesia

Industri Batu Bara: Penerapan EGD di Eropa dapat mengurangi permintaan batu bara, berdampak negatif pada ekonomi Indonesia yang bergantung pada ekspor batu bara. Penurunan industri ini dapat menyebabkan hilangnya banyak lapangan kerja, mempengaruhi kesejahteraan pekerja dan komunitas yang bergantung pada sektor tersebut.

Energi Terbarukan: Pengembangan energi terbarukan menghadirkan peluang, namun sektor ini juga menghadapi tantangan besar dalam beralih dari bahan bakar fosil, membutuhkan investasi besar dan waktu untuk beradaptasi.

Sektor Kelapa Sawit, Termasuk Pertanian dan Perkebunan Lain dan kaitannya dengan isu Deforestasi: EGD memperkenalkan standar keberlanjutan ketat untuk impor, termasuk produk kelapa sawit, yang menyulitkan eksportir kelapa sawit Indonesia memenuhi standar ini dan mengurangi ekspor ke Eropa. Eropa juga menekankan produk bebas deforestasi, sementara industri kelapa sawit Indonesia sering dikaitkan dengan deforestasi, menyebabkan hambatan perdagangan tambahan dan mengurangi daya saing produk kelapa sawit di pasar Eropa. Produk pertanian lain yang terkait deforestasi atau tidak memenuhi standar keberlanjutan Eropa juga akan berdampak negatif. Secara umum, karena Indonesia masih menghadapi isu deforestasi signifikan, banyak produk Indonesia mungkin dibatasi atau dikenakan tarif tinggi di pasar Eropa. Investor asing mungkin enggan berinvestasi di sektor-sektor terkait deforestasi di Indonesia, mengurangi aliran modal dan peluang ekonomi. EGD berdampak signifikan pada industri minyak sawit dan pengembangan biofuel di Indonesia, terutama terkait kriteria keberlanjutan, akses pasar, dan kerangka regulasi.

Rekomendasi

Pemanfaatan Implementasi EGD untuk Sektor Terdampak di Indonesia

Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan EGD untuk meningkatkan keberlanjutan di sektor batu bara, kelapa sawit, pertanian, dan pertambangan. Di sektor batu bara, transisi ke energi terbarukan bisa diperkuat dengan investasi teknologi hijau dari Eropa. Industri kelapa sawit dapat meningkatkan daya saing di Eropa dengan mematuhi standar keberlanjutan seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Sektor pertanian dapat mengadopsi praktik ramah lingkungan dan efisiensi untuk mengurangi dampak deforestasi dan memenuhi standar impor EGD. Di sektor pertambangan, terutama produksi bahan baku baterai mobil listrik, pemerintah bisa mendorong praktik pertambangan berkelanjutan dan menarik investasi teknologi bersih. Kolaborasi dengan Eropa dalam proyek energi terbarukan dan jaringan pintar dapat mempercepat transisi energi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Mitigasi Dampak Buruk EGD

Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah strategis untuk memitigasi dampak buruk EGD. Diversifikasi ekonomi dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor batu bara dan kelapa sawit, sementara investasi dalam pelatihan dan peningkatan keterampilan pekerja akan membantu transisi ke pekerjaan hijau. Kebijakan dan regulasi yang mendukung keberlanjutan, termasuk insentif untuk praktik ramah lingkungan, perlu diperkuat. Kolaborasi internasional dengan Eropa dalam proyek energi terbarukan dan teknologi bersih dapat menarik investasi asing dan mempercepat inovasi. Diplomasi perdagangan dan negosiasi kebijakan lingkungan yang adil harus diperkuat untuk memastikan akses produk Indonesia ke pasar Eropa.

Memperkuat Komunikasi atas Komitmen Indonesia terhadap Kesepakatan Paris dan Upaya Strategis untuk Melindungi Lingkungan dan Mencegah Deforestasi

Indonesia berkomitmen penuh terhadap Kesepakatan Paris, dengan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43,2% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Indonesia menargetkan Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, dengan fokus pada transisi energi dan pengurangan bahan bakar fosil. Upaya ini mencakup peningkatan energi terbarukan, efisiensi energi, dan konservasi hutan. Indonesia juga mencari dukungan internasional untuk mempercepat transisi ini.

Indonesia telah mengambil berbagai tindakan untuk melindungi lingkungan dan mencegah deforestasi, termasuk:

- **Moratorium Perkebunan Kelapa Sawit:** Instruksi Presiden No. 8/2018 menggantikan Instruksi Presiden No. 10/2011, dan moratorium ini diperpanjang menjadi permanen pada tahun 2019 untuk menghentikan izin baru untuk perkebunan di hutan primer dan lahan gambut.
- **Kebijakan Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan:** SKB Menteri No. 79/2014 dan rancangan Keputusan Presiden terus mendorong penyelesaian konflik lahan melalui pendekatan "One Map Policy" untuk menyelaraskan klaim lahan yang bersaing dan mengidentifikasi area yang paling tepat untuk restorasi hutan.
- **Pencegahan Kebakaran Hutan:** Instruksi Presiden No. 11/2015 tetap menjadi dasar kebijakan untuk pencegahan kebakaran hutan. Indonesia juga meningkatkan upaya dengan memperkuat lembaga terkait dan program-program penanggulangan kebakaran.
- **Pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP):** Perpres No. 61/2015, yang memfokuskan pada pendanaan dan pengelolaan program kelapa sawit berkelanjutan
- **Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO):** Permentan No. 38/2020 menggantikan Permentan No. 11/2015 untuk memperkuat standar keberlanjutan di sektor kelapa sawit dan meningkatkan penerimaan internasional terhadap ISPO.
- **Pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG):** Perpres No. 1/2016 diikuti oleh perluasan mandat BRG untuk mencakup restorasi mangrove pada tahun 2020, bertujuan untuk memulihkan lebih dari 2 juta hektar lahan gambut yang rusak.
- **Kebijakan Satu Peta:** Perpres No. 9/2016 terus mendorong penyelesaian konflik lahan dan membantu mencapai target restorasi hutan dengan mengintegrasikan data spasial yang akurat.
- **Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit:** Kepdirjen Perkebunan No. 29/KPTS/KB.120/2017 mendukung peremajaan kebun kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan di sektor ini.
- **RPJMN 2020-2024:** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menetapkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebagai indikator ekonomi makro utama, bersamaan dengan pertumbuhan PDB, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
- **Pengembangan Kawasan Industri Hijau:** Indonesia mengembangkan kawasan industri hijau seperti Kawasan Industri Kalimantan Indonesia (KIPI) di Bulungan, Kalimantan Utara, yang difokuskan pada manufaktur baterai EV dan produksi energi bersih. Proyek ini melibatkan investasi besar dari kemitraan internasional dan bertujuan untuk mengurangi emisi industri secara substansial.
- **Pendanaan Hijau:** Indonesia meluncurkan berbagai instrumen pembiayaan hijau, termasuk obligasi hijau dan pinjaman terkait keberlanjutan, untuk mendukung transisi energi dan mencapai target pengurangan emisi yang ambisius pada tahun 2030.
- **Inisiatif Pengurangan Sampah Plastik:** Indonesia berkomitmen untuk menghilangkan polusi plastik pada tahun 2040 dan telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi sampah plastik di laut sebelum mencapai laut.

Mendorong I-EU CEPA untuk Memperkuat Posisi Indonesia dalam Implementasi EGD

I-EU CEPA diharapkan dapat meningkatkan akses pasar, memperluas investasi, dan memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Isu minyak sawit menjadi bagian integral dari negosiasi ini untuk memastikan pembahasan

yang adil terkait tantangan perdagangan yang dihadapi industri ini di Eropa. Hambatan dalam negosiasi meliputi perbedaan standar keberlanjutan, hambatan teknis perdagangan, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan kepentingan ekonomi serta politik masing-masing pihak.



Peneliti: Ruddy Gobel (ruddy.gobel@gmail.com), Yudo Anggoro (yudo.anggoro@sbm-itb.ac.id), Aisyah Fanya Setiana (aisyah_setiana@alumni.sbm-itb.ac.id)

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Dr. Yudo Anggoro di yudo.anggoro@sbm-itb.ac.id atau cppm@sbm-itb.ac.id

Sekolah Bisnis dan Manajemen | Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesha 10 Bandung, Jawa Barat, 40132
Tel: +62 22 2531923

Tujuan dan disclaimer: Penelitian dan Policy Brief menyatukan penelitian dan data yang ada untuk menjelaskan fenomena yang menarik untuk diskursus kebijakan. Penelitian dan Policy Brief disertai nama penulis dan harus dikutip sebagaimana mestinya. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan sepenuhnya adalah milik penulis. Penulis tidak selalu mewakili pandangan SBM ITB ataupun pemerintah yang diwakili.